BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia membutuhkan manusia yang lain untuk saling berinteraksi dalam kehidupan. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama (*appetitus societas*).¹ Sedangkan P.J. Bouman mengatakan “*De mens wordt eerst mens door samenleving met anderen*”.² Yang berarti “Manusia itu baru menjadi manusia karena ia hidup bersama dengan manusia lainnya”.

Meskipun demikian, manusia merupakan individu mandiri yang mempunyai kepentingan dan kehendak yang terkadang sama dan sering pula berbeda. Dalam hubungan antar manusia persamaan ataupun perbedaan kehendak dan kepentingan merupakan hal yang lumrah terjadi. Dalam hal memenuhi suatu kepentingan seringkali membutuhkan orang lain untuk membantu pemenuhan tersebut. Seperti halnya sebuah perusahaan yang membutuhkan pihak lain untuk membantu proses produksi, maka pihak perusahaan melakukan hubungan bisnis dengan pihak lain berdasarkan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Kontrak merupakan perjanjian tertulis yang mengikat dan berlaku selayaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang terkait (asas *pacta sun servanda*).

¹Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 9.

²*Ibid*, hlm. 19.

Dengan diadakannya suatu perjanjian maka para pihak yang melakukan perjanjian menerima segala akibat hukuman yang timbul yakni adanya ikatan yang sangat erat antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban baik secara sepihak maupun secara timbal balik. Yang dimaksud dengan hak adalah wewenang yang diberikan hukum subjektif kepada subjek hukum. Kewenangan untuk berbuat sesuatu itulah yang disebut hak. Dengan kata lain hak adalah tuntutan sah, agar orang lain bersikap-tindak dengan cara-cara tertentu.

Pasal 1234 KUHPerdatamenegaskan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dengan demikian, berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban (prestasi) tersebut, dengan sendirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa: Barang, jasa (berupa tenaga atau keahlian), dan tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, prestasi tidak lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi/ditunaikan oleh debitur kepada kreditur yang terdapat di dalam setiap perikatan. Dimana prestasi itu biasa juga disebut dengan objek perikatan yang merupakan hak kreditur untuk menuntutnya kepada debitur, dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi tuntutan itu.

Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan *Force Majeur* atau *overmacht* adalah keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan/menunaikan prestasi disebabkan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar dugaan dan di luar kemampuan debitur sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kejadian tersebut.

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi prestasi bukan karena kealpaan atau kelalaian ataupun kesengajaan, melainkan karena terjadinya *Force Majeur* sehingga debitur tidak dapat dijatuhi hukuman. Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara, kedua pasal ini ditempatkan dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Alasan bagi pembuat undang-undang menempatkan pada bagian ini adalah karena *Force Majeur* menjadi suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Pasal 1244 KUHPerdara: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.

Pasal 1245 KUHPerdara: Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Force Majeur dalam KUHPerdara hanya menjelaskan bahwa keadaan memaksa mengakibatkan debitur dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Tidak adanya pengertian secara khusus tentang *Force Majeur* yang diatur dalam perundang-undangan menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat-pendapat oleh pakar hukum mengenai pengertian *Force Majeur*, bahkan juga bagi pihak-

pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini seringkali menjadi pemicu perselisihan dalam suatu perjanjian yang mengalami *Force Majeur*

Menurut Lalu Husni, mengatakan bahwa:

Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, khususnya dari kalangan buruh/pekerja karena dengan PHK buruh/pekerja yang bersangkutan akan kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi diri dan keluarganya, karena itu semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial (pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah), dengan segala upaya harus diusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³

Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan terdapat didalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

- (1) pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
 - a) Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - b) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
 - c) Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
 - d) Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - e) Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
 - f) Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g) Ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - h) Ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

³<https://repository.unja.ac.id/27343/5/BAB%201.pdf>, diakses pada tanggal 5 Desember 2021, pada pukul 12.20 Wib.

- i) Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j) Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih.

Kemudian Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kesalahan besar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh tertangkap tangan;
2. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;
3. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Seharusnya sesuai Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

“Pengusaha dapat melakukan PHK karena perusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (*Force Majeur*)”.

Selain itu Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 mengatur bahwa:

“Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Melihat hal tersebut ada beberapa perbedaan dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di PT. Sriwijaya Air Cabang Jambi banyak melakukan hubungan bisnis dengan pihak lain, hubungan bisnis ini terjadi dengan adanya suatu kontrak atau perjanjian. Yang dapat penulis uraikan tentang duduk perkaranya: Bahwa surat mutasi

tertanggal 10 Juli 2020 tersebut diberikan kepada para tergugat pada saat mediasi ketiga tanggal 13 Juli 2020 dimana berlakunya mutasi tersebut pada tanggal itu juga yaitu tanggal 13 Juli 2020. Sangat jelas dan terang mutasi tersebut adalah akal-akalan tergugat, apalagi mutasi sebelumnya tidak pernah dibicarakan, tidak ada penjelasan mengenai hak, fasilitas dan lain sebagainya baik secara langsung maupun secara tertulis, lagipula tempat dimana para tergugat dimutasi adalah zona merah pandemi Covid-19. Dengan demikian terang dan jelas tergugat telah melanggar Pasal 169 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu para penggugat menyampaikan keberatan baik langsung pada saat mediasi ketiga maupun surat tanggal 10 Juli 2020.

Bahwa tergugat tidak membayar upah dan lain sebagainya sebagai hak para penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus hubungan kerja antara para pengugat dengan tergugat.

Akan tetapi, tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau membayar hak para penggugat. Berdasarkan hal tersebut para penggugat mengajukan untuk penyelesaian masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, guna adanya penyelesaian baik mengenai hubungan kerja maupun mengenai hak-hak masing-masing para penggugat. Hal tersebut didukung oleh tergugat yang menyerahkan sepenuhnya pada proses Pengadilan Hubungan Industrial.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional peran pekerja semakin meningkat dan berjalannya hal tersebut, mengenai Perlindungan pekerja/buruh seharusnya harus semakin ditingkatkan, kesejahteraan, mengenai upah,

kesejahteraan, dan harkatnya sebagai manusia. Seperti zaman pada saat ini perusahaan masih banyak mengenyampingkan hak-hak dari pekerja/buruh dalam artian belum terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh, padahal melihat hal tersebut sebenarnya pekerja/buruh disini memiliki peranan yang penting sebagai bentuk suksesnya sebuah perusahaan. Bahkan untuk hak pekerja/buruh pada saat mereka terkena pemberhentian kerja secara sepihak padahal jelas pekerja/buruh dengan keadaan maraknya banyak para pekerja dirumahkan tidak menerima tunjangan (pesangon) yang telah dijanjikan oleh perusahaan terhadap pegawai/buruh. Sehingga, ini salah satu faktor penulis untuk meneliti perihal bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja/karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja tanpa alasan, kemudian penulis mengambil objek penelitian pada **Putusan Nomor 29/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN Jmb**, melihat putusan tersebut dari peraturan yang berlaku, bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi tidak dapat dijadikan alasan oleh para pelaku bisnis/pengusaha untuk tidak memenuhi prestasinya dengan alasan *Force Majeur*. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 dapat digolongkan sebagai kondisi *Force Majeur* relatif diaman hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara. Karena itu *Force Majeur relatif* tidak menyebabkan perjanjian batal, melainkan sebatas ditangguhkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis bermaksud untuk menganalisis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Force Majeur Pada Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan PT. Sriwijaya Air Cabang Jambi (Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2020 PN Jmb).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan hukum *Force Majeur* pada perjanjian terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerjaPT. Sriwijaya Air Cabang Jambi?
2. Bagaimana proses penyelesaian pada perjanjianterhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerjaPT. Sriwijaya Air Cabang Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkajidan menganalisispengaturan hukum *Force Majeur* pada perjanjian terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja PT. Sriwijaya Air Cabang Jambi.
2. Untuk mengkajidan menganalisisproses penyelesaian pada perjanjianterhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerjaPT. Sriwijaya Air Cabang Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis atau akademik, hasil penelitian bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang Pengaturan hukum *Force Majeur* pada perjanjian terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerjaPT. Sriwijaya Air Cabang Jambi.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan kepada pemerintah agar lebih tegas

menjalankan amanat Undang-Undang dalam hal menindak pelanggaran yang dilakukan perusahaan agar tidak ada pekerja/karyawan yang di ambil hak nya sebagai salah satu pihak dalam hubungan industrial.

E. Kerangka Konseptual

1. *Force Majeur* (Keadaan Memaksa)

Keadaan memaksa atau *Force Majeur* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya⁴. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force Majeur* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

2. Perjanjian Kerja

Didalam undang-undang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat 14 undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa: “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Selain pengertian didalam Undang-Undang yang mengatur, terdapat pendapat lain mengenai Perjanjian Kerja yang mana Iman Soepomo berpendapat bahwa:“pada dasarnya hubungan kerja yaitu hubungan buruh

⁴H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018, hlm. 115

dan majikan terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah”.⁵

3. Pemutusan Hubungan Kerja

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja oleh perusahaan kepada pekerjanya karena terjadinya sebab tertentu. Tindakan ini dapat mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kerja antara pengusaha dengan karyawannya. Biasanya, penyebab terjadinya PHK adalah karena efisiensi, penutupan bisnis, kepailitan, pekerja mangkir atau melakukan pelanggaran, karyawan yang bersangkutan meninggal dunia atau pensiun.

F. Landasan Teoritis

Landasan teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat teori dari para ahli hukum, baik dari akademisi maupun praktisi hukum. Menurut Vredenburg tentang tujuan teori seperti yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution yaitu secara generalisasi mempersoalkan pengetahuan dan menjelaskan hubungan antara suatu gejala sosial dan arti dari observasi yang dilakukan.⁶

Kerangka teori yang akan dipakai sebagai analisis dalam penelitian proposal ini ialah sebagai berikut:

⁵Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 70.

⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-II, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 139.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum, memiliki beberapa pengertian berdasarkan para ahli yang menjelaskan bahasan ini, diantaranya yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

- a. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah dengan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁸

⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

⁸<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1812/5/138400029>, diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 11.30 Wib.

- c. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa mengenai kekuasaan, baik berupa kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan ekonomi.⁹
- d. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Ada beberapa ahli yang menyatakan beberapa arti dari Hukum, seperti halnya Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menegaskan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

⁹*Ibid.*, hlm. 54.

¹⁰Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

¹²Dwika, “*Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 11 Oktober 2020.

¹³Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.¹⁵

G. Metode Penelitian

Pada bagian ini diuraikan metode yang digunakan Yuridis Normatif yang mana untuk mengetahui dan menulis secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini:

1. Tipe Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan carapendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridisnormatif dilakukan

¹⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini¹⁶.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum pendekatan undang-undang yang dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 97.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui cara menelaah kasus-kasus berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi, dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai suatu putusan¹⁷

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkemabang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. “Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi¹⁸.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang mana diuraikan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), adalah proses menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih

¹⁷*Ibid.*, hlm. 19.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 19.

memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada, bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “*Force Majeur* Dalam Perjanjian (Putusan Nomor 29/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN Jmb)”.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum perdata secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “*Force Majeur* Dalam Perjanjian (Putusan Nomor 29/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN Jmb)”.
- c. Bahan hukum tersier yang berfungsi pendukung bahan hukum primer dan skunder.

4. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:¹⁹

- a. Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan “*Force Majeur* Dalam Perjanjian (Putusan Nomor 29/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN Jmb)”.
- b. sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengeinterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan atasa Pemutusan Kerja.

¹⁹Maria S.W. Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 2014, hlm. 16.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menunjukkan keterkaitan antar bab dalam skripsi yang akan dibuat. Keterkaitan tersebut diuraikan dalam bentuk narasi pada setiap bab yang direncanakan mulai bab pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup.

BAB I Pendahuluan, Merupakan awal dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode dan sistematika penulisan.

BAB II Tentang Tinjauan Umum *Force Majeur* Dalam Perjanjian dan Pemutusan Hubungan Kerja, Teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum Perjanjian Kerja, Pekerja/Tenaga Kerja, Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja.

BAB III Membahas mengenai Pengaturan Hukum *Force Majeur* Pada Perjanjian terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pt. Sriwijaya Air Cabang Jambi Dan Proses Penyelesaian Pada Perjanjian terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pt. Sriwijaya Air Cabang Jambi dalam bab ini merupakan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja PT Sriwijaya Air Cabang

Jambidan dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor
29/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN Jmb.

BAB IVPENUTUP, Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang terdapat kesimpulan dan saran di dalamnya yang dikemukakan oleh penulis berdasarkan apa yang telah diteliti dan dibahas dalam pembuatan skripsi.